

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam dekade terakhir, semakin banyak perusahaan dengan berbagai sektor telah mengadopsi pelaporan keberlanjutan sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan akan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh publik. Pengungkapan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dipandang sebagai suatu cara bagi manajemen untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan dan calon investornya tentang bagaimana fokusnya pada masalah sosial ekonomi dalam operasinya, dapat menambah nilai bagi perusahaan (Chen, 2018). Pengungkapan CSR juga meningkatkan transparansi dan citra perusahaan, juga memberikan jangkauan yang lebih luas kepada investor mengenai informasi yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan di kalangan investor (Garas, S., 2018; Handayati et al., 2022). Pergeseran nilai-nilai sosial dan norma-norma dalam masyarakat juga dapat membuatnya mempertanyakan legitimasi perusahaan yang beroperasi di dalamnya yang membuat perusahaan dalam upayanya mencapai keberlanjutan perlu beradaptasi (Gaol, 2019; Handayati, 2022). Salah satu cara untuk mengurangi tekanan yang timbul karena kesenjangan legitimasi ini adalah dengan melakukan pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan. Apalagi protes yang mungkin muncul di dalam masyarakat atas apa yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada keberadaan dan stabilitas operasi perusahaan (Chen, 2018).

Pemerintah Indonesia telah mengatur pelaksanaan CSR melalui Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Hingga pada tahun 2021 belum ada aturan atau pedoman resmi yang jelas dalam membuat laporan keberlanjutan di Indonesia. Hal ini juga disepakati oleh Anggraeni & Djakman (2018) yang pada penelitiannya menyatakan bahwa belum ada kontrol legislatif yang jelas mengenai pelaporan CSR di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2021 OJK baru mengeluarkan Surat Edaran

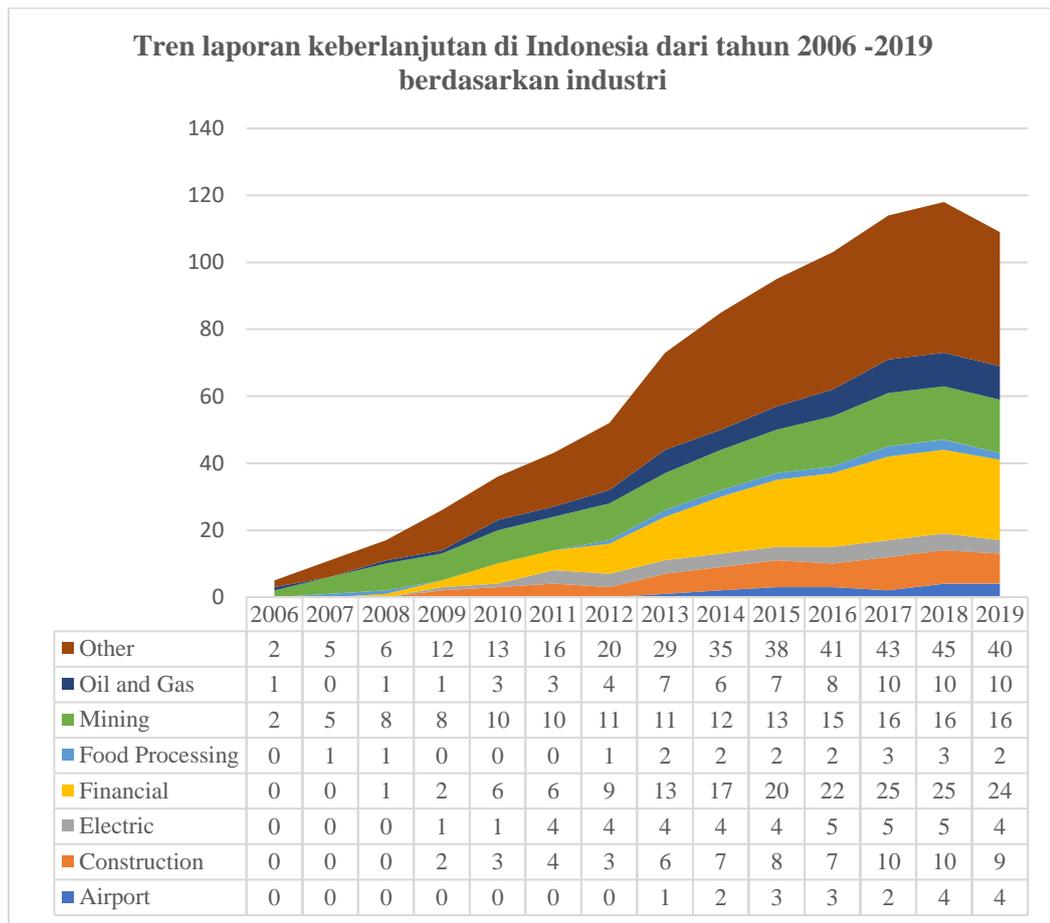
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 yang mengatur isi dan konten yang wajib ada di dalam laporan keberlanjutan emiten dan perusahaan di Indonesia. Sayangnya regulasi ini hanya sebatas mengisyaratkan pengungkapan minimum saja. Sehingga banyak perusahaan yang memadukan regulasi tersebut dengan standar global seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board (GSSB)* yang lebih lengkap dan relevan.

GRI dipandang sebagai salah satu pedoman yang komprehensif dan dapat diandalkan karena telah dipublikasikan secara global dan didukung oleh struktur laporan yang mewakili kepentingan berbagai pihak (Kartawijaya, 2010; Anggraeni, 2018). Menurut survei laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) pada tahun 2022, 78% dari 250 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan (G250) dan 68% dari 100 bisnis teratas di 58 negara (5.800 perusahaan yang dikenal sebagai N100) telah mengadopsi *GRI Standards* untuk pelaporan keberlanjutannya. Saat ini GRI telah menerbitkan standar terbarunya yaitu “*GRI Standards*” pada tahun 2022 lalu yang sekaligus memperbarui standar lama yaitu “*GRI Sustainability Reporting Standards*” yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Dalam *GRI Standards* terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan laporan keberlanjutan oleh perusahaan. Salah satunya adalah prinsip materialitas. Materialitas yang merupakan fokus dari *GRI Standards* adalah salah satu prinsip penting yang harus diungkapkan oleh perusahaan yang ingin melaksanakan laporan keberlanjutan mereka (Daromes, 2023). Proses mengidentifikasi aspek material merupakan salah satu inti dari penyusunan sebuah laporan keberlanjutan. Prinsip materialitas pada *GRI Standards* menekankan perusahaan agar dapat mengidentifikasi dan memilih topik mana yang paling relevan dan membutuhkan pengungkapan yang tinggi untuk dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutannya. Analisis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan dan kontribusi perusahaan bagi kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial di sekitar perusahaan. (Daromes, 2023).

Suatu studi yang dilakukan oleh Gunawan pada tahun 2022, dengan judul “*The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia*” menemukan bahwa tren laporan keberlanjutan di Indonesia meningkat dari tahun 2006 hingga

tahun 2019. Peningkatan tersebut diperlihatkan dalam grafik tren laporan keberlanjutan di Indonesia pada tahun 2006 hingga tahun 2019 yang diklasifikasikan ke dalam delapan sektor usaha berikut ini:

**Gambar 1.1 : Tren laporan keberlanjutan di Indonesia berdasarkan industri tahun 2006-2019**

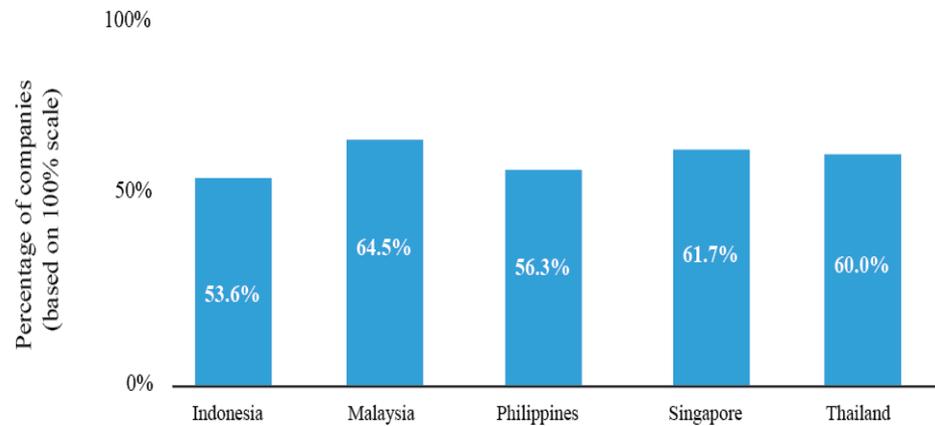


*Sumber : The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia (Gunawan, 2022)*

Namun, dibalik meningkatnya tren tersebut, tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan Indonesia belum memuaskan. Hal ini dibuktikan dari studi yang dilakukan oleh ASEAN CSR Network (ACN) terhadap 100 perusahaan di 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) di tahun 2018. Grafik yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan ACN dibawah ini, menunjukkan bahwa peringkat pengungkapan laporan keberlanjutan Indonesia masih dibawah 4 negara ASEAN lainnya.

**Gambar 1.2 : Tingkat Pengungkapan Rata-Rata Keberlanjutan Di Indonesia**

**Overall sustainability disclosure level of ASEAN countries**  
\*With disclosure rate of both Drivers (governance and reporting principles) and EES disclosure



Sumber : ASEAN CSR Network (2018)

Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan rata-rata keberlanjutan di Indonesia berada di angka 53,6% dibawah Filipina yang berada pada angka 56,3%. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya komitmen perusahaan di Indonesia dalam melakukan praktik keberlanjutan, terutama dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Sejalan dengan pernyataan Sari (2022) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa pemahaman perusahaan di Indonesia untuk kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat rendah. Terutama pada tiga sektor terbawah yaitu *electric, construction dan airport* yang masih memiliki tren pengungkapan yang rendah seperti yang terlihat pada grafik di atas.

Pemerintah telah menetapkan bahwa Infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam program kerjanya saat ini yang diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan investasi (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2019). Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk infrastruktur yang cukup besar. Pada tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat APBN sebesar Rp. 161,3 Triliun dimana Anggaran ini mengalami tren kenaikan tiap tahunnya (Prihapsari, 2022). Paparan permasalahan di atas menjadi acuan dasar bagi penulis dalam melakukan riset mengenai kualitas

pengungkapan laporan keberlanjutan dan materialitas dari laporan keberlanjutan perusahaan sektor infrastruktur. Sesuai dengan penelitian Machado (2020) yang menyatakan bahwa meskipun suatu organisasi telah mematuhi *GRI standards* dan telah memperoleh pengakuan organisasi *Global Reporting Initiative (GRI)* dalam pengungkapan materialitas, namun mereka tidak mengungkapkan informasi komprehensif dan mendetail tentang pendekatan mereka untuk mengidentifikasi topik material. Laporan keberlanjutan harus berkualitas tinggi dengan melaporkan topik-topik material bagi semua pihak yang terkena dampak untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (Meutia, 2022). Sehingga judul pada riset ini adalah **Kualitas Pengungkapan Topik Material pada Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah topik material pada laporan keberlanjutan oleh perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 memiliki kualitas pengungkapan yang telah sesuai dengan tingkat materialitasnya sesuai GRI?
2. Perusahaan infrastruktur mana yang memiliki nilai kualitas pengungkapan topik material yang tinggi dan telah sesuai dengan tingkatan materialitasnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui perbedaan kualitas pengungkapan topik material dengan tingkat materialitasnya pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui perusahaan manakah yang memiliki kualitas pengungkapan topik material yang tinggi dan telah sesuai dengan tingkatan materialitas yang ditetapkan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami pengungkapan laporan keberlanjutan yang berkualitas sesuai pedoman GRI terutama pada topik material.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pembelajaran dan penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dasar masyarakat terkait pengungkapan laporan berkelanjutan yang berkualitas.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya mengacu pada perusahaan yang menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keberlanjutannya dan hanya membahas pada topik material yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keberlanjutannya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bagian ini menjelaskan teori, kerangka berpikir, dan konsep dasar yang mendasari penelitian serta tujuan kepustakaan yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini menerangkan terkait bagaimana metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, sampel yang digunakan, sumber data, jenis data, serta metode analisis yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan tentang penjelasan dari analisis data yang telah dilakukan dalam menjawab rumusan masalah yang ada dan menjawab hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini berisi tentang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi serta saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

